

Meli Teresia

by UNITRI Press

Submission date: 03-Nov-2022 09:49AM (UTC+0700)

Submission ID: 1894310692

File name: Meli_Teresia.docx (34.2K)

Word count: 780

Character count: 5360

1
**ANALISIS PENERAPAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BERDASARKAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 113 TAHUN 2014**

(Studi di Desa Senyabang, Kecamatan Balai, Kabupaten Sanggau)

SKRIPSI



Oleh :

MELI TERESIA

NIM. 2018110219

ABSTRAK

Pemerintah memiliki tanggung dalam pengaturan dana yang disalurkan dalam melaksanakan program kerja untuk kesejahteraan masyarakat. Tujuannya adalah untuk menginspirasi anggota Pemerintah Desa untuk mengedukasi masyarakat umum tentang pengelolaan desa. 2 terletak di bagian Pengelolaan Keuangan Desa. 113 Tahun 2014. Penelitian kualitatif deskriptif ini mengumpulkan informasi melalui catatan tertulis, wawancara, dan observasi. Triangulasi sumber adalah teknik untuk menentukan validitas prospektif dari data yang dikumpulkan di lapangan. untuk tahap reduksi data, penyajian data, dan menggunakan model analisis penelitian Miles dan Huberman untuk menarik kesimpulan data yang ada. Dokumen realisasi APBD telah mendekati seluruh masyarakat untuk mewujudkan partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas di Desa Senyabang, sesuai dengan temuan penelitian ini. Hasilnya, perencanaan, Pengelolaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa berjalan dengan baik. Terwujudnya APBDesa difasilitasi oleh berbagai faktor, antara lain akses informasi, komunikasi, partisipasi, dan legalitas BPD.

Kata Kunci: ⁶ **Pengelolaan Keuangan Desa, APBDesa**

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Bukti internasional potensi ekonomi Indonesia masih tergolong tinggi mulai muncul. Ekonomi Indonesia merupakan ekonomi yang pesat jika dibandingkan negara yang ada di Asia Tenggara. Selain itu, pemerintah pusat telah menunjukkan dukungan kuat dalam beberapa tahun terakhir untuk membatasi ekspor masyarakat (mentah) Indonesia dan memperluas peran ekonomi industri.

Indonesia telah mengalami banyak transformasi dari waktu ke waktu, yang dibuktikan dengan otonomi daerah dan pembentukan sistem otoritas publik dengan pemerintah pusat, kota, kabupaten, dan desa. penggunaan lahan yang setara untuk kepentingan masyarakat, khususnya pedesaan. Kita menyadari bahwa ketentuan umum Permendagri No 113, thn 2014 dana yang disediakan untuk desa telah disisipkan melalui APBN. Dana tersebut disalurkan melalui APBD, Pendapatan Daerah yang dialokasikan untuk kesejahteraan masyarakat.

Karena kebijakan otonomi daerah belum berjalan dengan baik, pembangunan tidak merata antara masyarakat pedesaan dan perkotaan. Untuk menjaga keseimbangan antara kedua kelompok tersebut, pemerintah Indonesia telah mengolah keuangan yang dikelola Menteri dalam negeri yang tertuang dalam Peraturan No 113 tahun 2014. Didalam UU no 6 thn 2014 menjelaskan maksud dari pembangunan desa yang sejahtera untuk mengentaskan kemiskinan dengan memenuhi kebutuhan dasar, mengembangkan potensi ekonomi, dan membangun sarana dan prasarana untuk menunjang kehidupan desa. lokal, serta lingkungan. Hal ini memberikan peluang bagi desa untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat desa dengan mengelola keuangannya sendiri.

Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi merupakan prinsip pedoman pengelolaan keuangan desa, yang dilaksanakan secara tertib dan disiplin anggaran. Wajar jika pengelolaannya berhasil, hal ini akan bermanfaat bagi masyarakat desa. Lahirnya peraturan pemerintah, UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, UU tersebut memfokuskan pada pengembangan desa yang ada di

Indonesia dalam mengembangkan potensi dan menjadikan daerah menjadi lebih mandiri. Kewajiban ini mengharuskan pemerintah desa bertanggung jawab.

Dalam penentuan keberhasilan pelaksanaan untuk meraih tujuan dalam efektivitas perlunya peran organisasi dalam menaungi pelaksanaan yang akan diimplementasikan secara langsung.

Menurut David Wijaya (2018:62), dana desa adalah uang yang semula digunakan bagi desa yang dianggarkan melalui APBN, APBD Kab/Kota digunakan untuk transfer dana dalam merealisasikan pembangunan kelangsungan masyarakat yang lebih baik. APBN termasuk dana yang diperoleh dari pemerintah untuk desa, APBN ini dana yang diperoleh secara bertahap yang pengeluarannya ditetapkan sebesar 10%.

Jumlah APBN yang disalurkan setiap daerah bermotivasi tergantung dari banyaknya desa di daerah tersebut. Selain jumlah desa angka penduduk, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka kesejahteraan masyarakat menjadi faktor pembeda dari pendapatan APBN yang didapatkan daerah tertentu. Seperti yang diketahui pengelolaan desa tidak lepas dari perkembangan desa yang lebih maju, penyusunan APBDes yang dilakukan oleh sekretaris desa merupakan perencanaan yang telah diolah dengan angka kecukupan dan keperluan dari daerah tersebut. Untuk itu peneliti disini ingin mengetahui efektivitas dari kesejahteraan dan kuantitas hidup masyarakat pedesaan khususnya desa senyabang yang ada di Provinsi Kalimantan barat, yang menjadi fokus pemantauan peneliti disini dilihat dari bagaimana pengelolaan APBDes yang memiliki peranan dalam mengendalikan keuangan desa dan perencanaan awal dari pengelolaan dana yang telah didapatkan.

Peneliti didorong untuk memilih judul penelitian berdasarkan uraian sebelumnya, seperti **“Analisis Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014”**. Dalam pengulasan permasalahan yang akan diselesaikan akan memfokuskan pada pengintervensian dana keuangan.

2. Rumusan Masalah

Peneliti akhirnya menemukan permasalahan tersebut sebagai hasil dari penjelasan sebelumnya: Bagaimana Desa Senyabang mengolah perekonomian sesuai permendagri yang no 113 tahun 2014?

3. Tujuan Penelitian

Untuk melihat pengelolaan keuangan Desa Senyabang sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

4. Manfaat Penelitian

1. Mahasiswa yang ingin melakukan penelitian tambahan tentang penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 dalam Pengelolaan Keuangan Desa dapat mengambil manfaat akademis dari temuan penelitian ini.
2. Temuan hasil rumusan masalah bisa dijadikan acuan Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang untuk memfasilitasi berbagi pengetahuan dan akses bahan pustaka. Mereka juga dituntut untuk meningkatkan pemahaman, informasi, dan masukan terkait Analisis Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan.

Meli Teresia

ORIGINALITY REPORT

12%

SIMILARITY INDEX

11%

INTERNET SOURCES

9%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.usd.ac.id Internet Source	6%
2	kumparan.com Internet Source	1%
3	123dok.com Internet Source	1%
4	Eko Sumarsono, Muh Effendi Purnomo. "EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DENGAN PENERAPAN SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI DANA DESA", Solusi, 2019 Publication	1%
5	docplayer.info Internet Source	1%
6	www.slideshare.net Internet Source	1%
7	David Syam Budi Bakroh. "Menyoal Akuntabilitas Dalam Desentralisasi Pengelolaan Keuangan Desa", JURNAL MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK, 2019	1%

Publication

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches Off